

Dampak Pannemi Covid-19 Terhadap UMKM (Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Surabaya)

Wiwin Wahyuni¹, Lilik Mardiana²

^{1,2} Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Email : wiwinwahyuni@uwks.ac.id¹, lilikmardiana@uwks.ac.id²

Abstract: This Covid-19 has had a bad impact on business dan the economy, even business dan economic uncertainty has become a very frightening specter for MSME actors. In order to maintain business continuity while at the same time saving the national economy, the government has implemented various socio-economic policy programs, including policy incentives dan tax facilities that can be utilized by taxpayers. MSMEs are expected to boost economic growth dan economic recovery. Through the empowerment of micro-enterprises, they can help people who have experienced layoffs dan lost income because their businesses have been affected by the COVID-19 pandemic. The government can provide grants for start-up businesses. Among them are through people's business credit dan providing loan repayment relief for MSMEs. The National Economic Recovery Policy (PEN) will encourage the re-growth of micro, small dan medium enterprises. The government can provide grants for start-up businesses. Among them are through people's business credit dan providing loan repayment relief for MSMEs. Nevertheless, he continued, it is necessary to increase cooperation between ministries, institutions, local governments, banking institutions, fintech, marketplaces, dan all business actors so that they can compete in the market during this pandemic, support MSMEs to advance to class by helping implement digitalization of the environment. every step of daily business operations.

Keyword: *SMEs, Covid-19, Economic Recovery*

Abstrak: Covid-19 ini telah berdampak buruk terhadap bisnis dan ekonomi, bahkan ketidakpastian bisnis dan ekonomi menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pelaku UMKM. Guna menjaga keberlangsungan bisnis yang sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, termasuk kebijakan insentif maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. UMKM diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami PHK serta hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid 19. Pemerintah bisa memberikan hibah bagi usaha pemula. Di antaranya melalui kredit usaha rakyat serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), itu akan mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah bisa memberikan hibah bagi usaha pemula. Di antaranya melalui kredit usaha rakyat serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Kendati demikian, diperlukan peningkatan kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, *fintech*, *marketplace*, dan seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar pada masa pandemi ini, mendukung UMKM agar naik kelas dengan cara membantu menerapkan digitalisasi terhadap setiap langkah operasional bisnis sehari-hari.

Kata kunci: *UMKM, Covid-19, Pemulihan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona (Covid-19) mempunyai pengaruh yang sangat signifikan diberbagai tatanan kehidupan manusia saat ini. Larangan dan pembatasan sosial dijadikan slogan sebagai peringatan bersama bahwa wabah ini mempunyai perkembangan penyebaran yang sangat masif. Slogan kembali ke rumah atau “*stay at home*” merupakan cara yang cukup ampuh untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Pembatasan berskala besar mempunyai dampak yang cukup baik dalam waktu relatif lama berdampak positif disegi kesehatan, penurunan penyebaran khususnya di Ibukota Jakarta mulai dirasakan, Namun hal ini berbdaning terbalik pada sektor perekonomian. Sejumlah besar tenaga kerja harus kehilangan pekerjaan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama berskala mikro tidak memiliki modal untuk usaha, penutupan UMKM sebagai dampak tidak langsung dari pembatasan berskala besar dan *stay at home* membuat UMKM terpuruk karena tidak dapat melakukan usaha dan modal terpakai untuk keperluan sehari-hari.

Salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini didasarkan fakta bahwa UMKM telah banyak berkontribusi dalam perekonomian nasional. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensi besarnya dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Ariani dan Utomo, 2017).

Langkah-langkah atau upaya pemerintah ini berfokus pada pencegahan kebangkrutan UMKM dan perlindungan kelangsungan hidup para pekerja (Lim *et al.*, 2020). Peranan penting yang dimainkan oleh UMKM, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengembangan inovasi, serta penciptaan lapangan kerja, diseluruh lapisan masyarakat (Cowling M, Liu W dan Ledger A, 2015 ; Senderovitz M, 2016).

Sebagian besar masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya (Ariani dan Utomo, 2017) Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surabaya mencapai angka puluhan ribu. Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Surabaya mencatat selama 2021, ada 40.679 UMKM. Covid-19 ini telah berdampak buruk terhadap bisnis dan ekonomi, bahkan ketidakpastian bisnis dan ekonomi menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pelaku UMKM dan hampir seluruh sektor usaha menerima imbas negatif dari ketidakpastian bisnis, termasuk ada sebagian usaha yang mulai berhenti beroperasi yang akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kebijakan dengan menggelontorkan sejumlah dana APBN maupun APBD yang dikerahkan untuk mengatasi masalah penanganan virus Covid-19 ini, baik dari segi kesehatan.

Pemerintah berupaya untuk membuka beberapa sektor usaha dan terus mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan secara *online*, namun tetap pada pemantauan dan secara bertahap guna meningkatkan penerimaan pajak. Guna menjaga keberlangsungan bisnis yang sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, termasuk kebijakan insentif maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Disaat Pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk UMKM yang alokasinya berkisar 123,46 Triliun. Stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk UMKM berupa subsidi bunga, belanja UP, PPh final UKM DTP, penepatan dana untuk restrukturisasi, penjaminan untuk modal kerja, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM. Namun saat ini anggaran stimulus untuk UMKM belum seluruhnya terealisasi. Anggaran tersebut hanya terealisasi sebesar 0,06% (Rachbini, 2020).

Dinas koperasi dan perdagangan melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai motor ekonomi rakyat. UMKM diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami PHK serta hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid 19. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), akan mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah bisa memberikan hibah bagi usaha pemula. Diantaranya melalui kredit usaha rakyat serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Kendati demikian, diperlukan peningkatan kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, *fintech*,

marketplace, dan seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar pada masa pandemi ini, mendukung UMKM agar naik kelas dengan cara membantu menerapkan digitalisasi terhadap setiap langkah operasional bisnis sehari-hari. Mulai dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga administrasi. Bergabungnya para pelaku UMKM dalam *platform* digital diharapkan dapat menjalankan usaha dari rumah, terhubung pada ekosistem digital, serta melakukan adaptasi dan inovasi, sehingga produk dapat dikenal. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah,

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kabupaten dan menentukan langkah strategis yang harus diambil oleh UMKM kelurahan Margorejo untuk mempertahankan eksistensinya pada masa pasca pandemi Covid 19.

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan oleh UMKM dalam menjalankan operasional usaha. Asas-asas tersebut meliputi kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 2 UU. No.20 Tahun 2008). Lalu tujuan dari UMKM sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU. No.20 Tahun 2008 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. (Andana, 2017). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menetapkan bahwa UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020. Pembatasan sosial yang berupa himbuan itu rupanya dianggap kurang efektif dalam mencegah penularan Covid-19. Oleh karena sebagian kantor dan industri tetap buka, dan didesak kebutuhan hidup, banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya pada 10 April, atas persetujuan pemerintah pusat, dimulailah penerapan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Selanjutnya disusul Bodetabek beberapa hari kemudian, dan kota-kota besar lainnya.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/ pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan (Katadata.co.id, 2020).

Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemic ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa diantaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd*, dan *Low-Mobility* (CNBC Indonesia, 2021).

Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi Covid-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha ke termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh-kembangkan

berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. Namun, aktivitas bisnis dan prospek pertumbuhan sektor UMKM cenderung semakin membaik pada kuartal I/2021. Pemulihan UMKM ini memberikan sinyal positif semakin pulihnya perekonomian nasional yang sempat tertekan akibat pandemi Covid-19. BRI Micro dan SME Index (BMSI) terbaru mencatat adanya kenaikan signifikan dalam Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Ekspektasi Aktivitas Bisnis (IEAB), dan Indeks Sentimen Bisnis (ISB) per kuartal I tahun ini dibandingkan dengan kuartal IV/2020. Riset tersebut menunjukkan peningkatan BMSI menjadi 93,0 dari sebelumnya 81,5 pada kuartal IV/2020. Selain itu, pelaku UMKM juga makin optimistis terhadap prospek usahanya yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks ekspektasi BMSI menjadi 128,0 dari sebelumnya 105,4 pada kuartal IV/2020. Sejalan kenaikan BMSI dan ekspektasinya, persepsi pelaku UMKM juga meningkat terhadap perekonomian secara umum. ISB pelaku UMKM meningkat signifikan menjadi 115,5 dari sebelumnya 90,2 pada kuartal IV/2020. Kenaikan IAB, IEAB, dan ISB menunjukkan mulai berputarnya aktivitas UMKM di lapangan, tingginya optimisme mereka atas kondisi yang lebih baik (Bisnis Indonesia, 2021).

Optimisme yang tercermin melalui hasil riset tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, meningkatnya aktivitas masyarakat karena angka infeksi baru dan kasus aktif Covid-19 terus turun ditengah makin meluasnya program vaksinasi. Kedua, naiknya produksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh hari besar seperti Imlek dan hari raya Idul Fitri. Ketiga, panen raya disejumlah daerah yang mendorong kenaikan harga komoditas. Keempat, relaksasi dari pemerintah kepada pengusaha sector properti dan relaksasi pembelian rumah baru. Solusi dan Tantangan

Pemulihan UKM Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan

pemutusan hak kerja (PHK) pada MKM. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal (CNBC Indonesia, 2021).

Dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun hingga 11 Mei 2021 realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp172,35 triliun. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I, yakni Rp123,26 triliun. Adapun sektor-sektor tersebut, yakni kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, program prioritas Rp21,8 triliun atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Di sisi lain, percepatan penyaluran perlindungan social pemerintah juga tampak dari besarnya serapan anggaran itu. Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan. Hingga 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Lalu, realisasi kartu sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) mencapai Rp11,81 triliun atau 98,39% dari anggaran Rp12,0 triliun dan program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun (Media Indonesia, 2021). Sedangkan, khusus untuk program Dukungan UMKM telah terealisasi sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu sebesar Rp191,13 triliun. Realisasi untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp12,8 triliun atau sebesar 88,11% dari pagu yang mencapai 15,36 triliun (Kemenkeu, 2021).

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal (CNBC Indonesia, 2021). Dorongan UMKM untuk memanfaatkan platform digital sangat dibutuhkan apalagi pada kondisi pandemi saat ini. Pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan efisiensi serta menambah saluran penjualan/ pemasaran sektor UMKM yang saat ini terbatas akses fisiknya dengan pelanggan/pengguna jasa. Percepatan vaksinasi juga didorong untuk memulihkan kepercayaan konsumsi masyarakat termasuk bagi karyawan dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Vaksinasi sudah dan akan diberikan secara gratis untuk mencapai *herd immunity* dari 181,55 juta penduduk (kemenkeu, 2021). Namun program vaksinasi gotong royong pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha yang mampu. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK 01. 07/ Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, pemerintah menetapkan harga vaksin senilai Rp321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp117.910 sehingga total harga menjadi Rp879.140 per dua kali suntikan. Namun, asosiasi UMKM menyatakan bahwa kemampuan perusahaan UMKM untuk mengikuti program Vaksinasi Gotong Royong jauh di bawah nominal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menganggap harga yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu mahal (Bisnis Indonesia, 2021). Hal tersebut berpotensi membuatbanyak perusahaan terutama UMKM enggan mengikuti program sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi terkendala. Sehubungan masalah ini,

pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan subsidi khusus untuk program Vaksinasi Gotong Royong bagi badan usaha yang memang tak mampu. Selain itu, pemerintah akan mendukung sektor Hotel, Restoran, Kafe (HOREKA) melalui restrukturisasi kredit dan penjaminankredit. Kemudian, relaksasi Kebijakan

Restrukturisasi Kredit Perbankan, perluasan Penjaminan Kredit Korporasi berdasarkan PMK32/2021, subsidi bunga untuk UMK, baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 dari sebesar Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun, mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta melanjutkan Program Kartu Prakerja (Kemenkeu, 6 Mei 2021).

Rencana pemerintah dalam membentuk holding BUMN ultra mikro pada semester II tahun ini juga dianggap dapat mendorong pemberdayaan UMKM. Pembentukan holding BUMN ultra mikro dibutuhkan untuk menyinergikan gerak ketiga perusahaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Tanpa holding, gerak tiga perusahaan negara ini dalam mengembangkan pelaku UMKM dan usaha mikro berjalan sendiri-sendiri (Beritasatu, 7 Mei 2021). Pembentukan holding BUMN ultra mikro diharapkan dapat memastikan terciptanya penyaluran pembiayaan kredit mikro yang lebih terarah, dengan bungalah lebih rendah, serta mudah dan mampu menjangkau banyak calon nasabah. Manfaat yang diharapkan tersebut akan dapat mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar dan peluang pemasaran yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan adanya holding BUMN ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah data UMKM yang saat ini masih belum terintegrasi.

METODE

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. fenomenologi yaitu sebuah metode riset yang berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu (Cresswell: 1998). Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu mengumpulkan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, serta menyimpulkan data. Peneliti mengumpulkan, mengkaji dan mendeskripsikan semua gejala -gejala yang terjadi akibat covid -19 dan efeknya terhadap bisnis UMKM yang ada kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Jenis data yang digunakan ialah data subjek. Data tersebut berupa informasi yang didapatkan dari pelaku UMKM kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap usaha yang dirintisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Virus Corona telah mencuri perhatian seluruh warga dunia. Munculnya Virus Corona tentu berdampak pada berbagai lini kehidupan, termasuk para pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sejumlah pelaku bisnis pasti kesulitan untuk mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian nasional terganggu akibat Corona. Selain kesulitan mencapai target tertentu pasar yang lesu akibat dampak dari Virus Corona tidak mampu mendongkrak angka penjualan para pelaku bisnis. UMKM. Imbasnya pendapatan yang diterima pun tidak sesuai harapan. Berdasarkan data di kelurahan margorejo terdapat 90 Pelaku UMKM dimana beragam usaha yang terdapat didalamnya ada usaha membuka toko kelontong, warung kopi, usaha homemade makanan minuman, minuman herbal, dan scarf dan dibidang jasa mulai service elektro sampai tambal ban. Dalam wawancara penulisan ini ada 55 UMKM. 55 UMKM ini berlatar di Margorejo dan Jalan Jetis Wetan. Terdapat 10 UMKM yang memiliki usaha menjual acecoris, handcraft, kain jumputan, pembuat hantaran dan fasion. 26 UMKM memiliki usaha makanan minuman, catering. 12 UMKM memiliki usaha memiliki usaha peracangan sembako, warung kopi . 6 UMKM memiliki usaha jasa bengkel, service elektronik, laundry, terapis bekam dan tambal ban.

Para pelaku UMKM di kelurahan margorejo yang bentuk usahanya membuat makanan minuman atau menjual makanan minuman ada beberapa yang bisa tetap bisa bertahan karena Dimasa Covid-19 masyarakat tetap membutuhkan makanan dan minuman untuk meningkatkan imun tubuh. Pengusaha makanan dan minuman homemade yang mengalami dampak penurunan omset adalah makanan kue basah, jajan pasar yang biasanya di pesan banyak untuk acara besar atau hajatan. Dampak negatif Covid-19 terhadap UMKM di kelurahan margorejo disebabkan oleh beberapa kebijakan berkaitan dengan: (1) pembatasan buka toko, warung, kios dan pasar, (2) kebijakan *work from home* dan adanya sistem *sift* antar pegawai, dan (3) pembatasan terhadap keramaian atau kerumunan. Kebijakan pembatasan buka toko, warung, kios dan pasar menyebabkan lesunya

perekonomian dan masyarakat menjadi enggan untuk berbelanja. Masyarakat hanya akan membeli barang-barang kebutuhan pokok, sedangkan barang-barang yang dinilai masih produktif secara ekonomi masih tetap diberdayakan. Demikian juga dengan UMKM yang melakukan penjualan secara terbatas baik di pasar, warung-warung, kios dan perumahan pribadi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM di kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sangat terasa karena turunnya omset atau pendapatan mereka. Namun ada UMKM yang tidak mengalami permasalahan tersebut, adalah UMKM yang bergerak dibidang kesehatan, makanan dan pengolahan pangan. Beberapa UMKM yang bidangnya pembuatan minuman herbal mengalami kenaikan permintaan karena mereka beranggapan minuman herbal sebagai salah satu obat untuk mencegah tertularnya Virus Covid-19. Ada pun minuman herbal yang diproduksi oleh UMKM Margorejo adalah Djamoeh dimana menyediakan minuman herbal yang berasal dari tanaman rimpang yang dipadukan dengan bahan lainnya sehingga tidak mengurangi rasa dan khasiatnya. Sebagaimana UMKM di Margorejo yang pemiliknya anak-anak muda ada yang sudah mendaftarkan produk yang dijual di marketplace seperti Gojek dan Shopee, tetapi sebagian yang lain masih menjual melalui status aplikasi Whatsapp dan beberapa yang sudah dikenal melalui info tetangga,

Para pelaku UMKM di Margorejo sebagian besar memanfaatkan kebijakan pemerintah dibidang Fiskal pelaku UMKM dibebaskan dari pembayaran pajak PPh Final PP 23 selama masa pajak April 2020 hingga September 2020. Untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut, maka wajib pajak UMKM harus melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan terlebih dahulu di laman www.pajak.go.id. Setelah itu, wajib pajak UKM menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP yang meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dan dilampirkan dengan SSP atau cetakan kode *billing*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan wawancara maka UMKM di Margorejo ada beberapa mengalami dampak COVID-19 tetapi ada yang tidak berdampak, atas

dasar ini maka penulis ingin menyarankan supaya para pelaku UMKM di margorejo lebih mengembangkan produk atau inovasi produk. Selain itu para pelaku juga harus faham bagaimana memasarkan produk di marketplace. Para pelaku UMKM di Margorejo memanfaatkan proram pemerintah kebijakan insentif pajak dalm PMK 44/PMK.03/2020 dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM di margorejo telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti pengelolaan, pemasaran dimana kelurahan melakukan sosialisai terkait bagaimana UMKM bisa bangkit dengan merangkul kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Surabaya baik negeri atau swasta. Pasca Covid -19 para pengusaha dan pelaku UMKM meningkatkan ketahanan dengan awal yang inovatif, kewirausahaan dan model bisnis baru harus dipromosikan meskipun pada saat yang sama, UMKM tradisional yang sebagian besar menghilang dan perusahaan mikro yang berjuang untuk mengambil manfaat dari transisi digital harus mempercepat digitalisasi dan adopsi teknologi, perubahan organisasi dan peningkatan keterampilan. Keluar dari krisis, UMKM harus muncul dengan perlengkapan yang lebih baik secara digital dan dengan kemampuan tenaga kerja yang diperkuat

DAFTAR RUJUKAN

- Alwiyah. 2017. Batik Madura Sejarah Jati Diri Dan Motif. Sumenep. Universitas Wiraraja Sumenep.
- Andana, C. F. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. ISEI Madura.
- Ariani dan Utomo, 2017 Strategi Pengembangan Kajian Uasaha Mikro Kecil dan Menengah di Tarakan.
- Creswell, 1998. Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions. USA: Sage Publications Inc
- Cowling, M, Liu, W, Buku Besar, A, dkk . (2015) Apa yang sebenarnya terjadi pada usaha kecil dan menengah dalam resesi ekonomi global? Bukti Inggris tentang penjualan dan dinamika pekerjaan . Jurnal Bisnis Kecil Internasional 33(5): 488 – 513 .
- Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19, 20 Juni 2020, <https://katadata.co.id/umkm>, diakses 18 Mei 2022.

- Pencairan Program PEN Capai Rp172,35 Triliun, Media Indonesia, 18 Mei 2021, hal. 2
- Realisasi dan Serapan Program PEN 2021 Dinilai Lebih Baik, 17 Mei 2022, <https://mediaindonesia>.
- Darmanto, Wardaya, dkk. 2018. Sekilas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kiat Mempercepat Kinerja UMKM Dengan Model Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan. Yogyakarta. Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Hadad, M. (2020). What We Can Do for SMEs. ISEI Madura.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid- 19. *BASKARA: Journal of Business dan Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology dan Counseling*, 2(1), 146-153.
- Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Lampung. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rachbini, D. J. (2020). UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. ISEI Madura.
- Sarjono, Sigit. 2017. Ekonomi Mikro Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta. Dani (Anggota IKAPI).
- Sugiono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Bdanung. Alfabeta.
- Suharyadi, Harisetyanto, Nugroho, dkk. 2007. Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 16. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wikipedia, 2020. Pandemi Covid-19. <https://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 21 Oktober 2020.

[www.ojk.go.id.\(2017\).Undang-](https://www.ojk.go.id/2017/08/01/und-undang-nomor-20-tahun-2008-tentang-usaha-mikro-kecil-dan-menengah) undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diakses dari [https://www.ojk.go.id sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang /Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx](https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx) pada 3 Juni 2020